

<http://ejournal-pps.unsri.ac.id/index.php/dejos/article/view/52>

*by Neng Yanti*

---

**Submission date:** 24-Jun-2023 01:36PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2121768429

**File name:** 52-1-76-8-10-20200111\_10.pdf (728.68K)

**Word count:** 2835

**Character count:** 18484

## Implementasi Program Satam Emas di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016

Dewi Susanti<sup>1</sup>, Nengyanti<sup>2</sup>, Andries Lionardo<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Staf Bidang Sosial dan Pemerintahan DP4D Kabupaten Bangka Barat

<sup>2,3</sup>Dosen Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik

E-mail: [thewe84@yahoo.com](mailto:thewe84@yahoo.com)

**ABSTRAK.** Kemiskinan hingga saat ini masih menjadi permasalahan penting yang harus diatasi oleh pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan tingkat kemiskinan yang rendah, masih harus terus berupaya mengentaskan kemiskinan di wilayahnya. Salah satu upaya tersebut diwujudkan dengan merumuskan sebuah program penanggulangan kemiskinan yang diberi nama Program Satu Milyar untuk Tiap Kecamatan Menuju Pembangunan yang Efektif, Merata, Adil dan Selaras (SATAM EMAS). Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan proses implementasi dan penyebab terjadinya ketidakoptimalan penyerapan anggaran Program SATAM EMAS di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan data diperoleh melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses implementasi Program SATAM EMAS di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016, belum sepenuhnya berjalan optimal. Ditemukan adanya ketidaksesuaian antara apa yang diharapkan terjadi dengan kenyataannya di antara aspek yang saling berinteraksi yang kemudian mendorong jadwal dalam rangkaian proses implementasi yang akhirnya menyebabkan tidak dapat terlaksananya pekerjaan pembangunan tahap kedua di Kabupaten Bangka Barat sehingga dana program tidak dapat terserap sepenuhnya.

Kata kunci : Kemiskinan, Rumah Layak Huni, SATAM EMAS

**ABSTRACT.** Poverty is still an important problem that must be overcome by the government both at the central and regional levels. The Provincial Government of the Bangka Belitung Islands with a low poverty rate, must continue to work to alleviate poverty in the region. One of these efforts is realized by formulating a poverty alleviation program called the One Billion Program for Each District Towards Effective, Equitable, Fair and Selected Development (SATAM EMAS). This research was conducted to explain the implementation process and the causes of the optimism of the absorption of the SATAM EMAS Program budget in West Bangka Regency in 2016. This study used descriptive qualitative methods and data obtained through interviews, observations and documentation studies. The results showed that the process of implementing the SATAM EMAS Program in West Bangka Regency in 2016 was not yet fully optimal. It was found that there was a mismatch between what was expected to happen and in reality among the interacting aspects which then pushed the schedule in a series of implementation processes which ultimately caused the second phase of development work to be carried out in West Bangka Regency so that program funds could not be fully absorbed.

Keywords: Poverty, Habitable Homes, SATAM GOLD

### PENDAHULUAN

Pada tahun 2013, Laporan PBB tentang MDGs menyatakan kemiskinan ekstrem di tingkat global sebesar 47% pada tahun 1990 telah berkurang menjadi 22% pada tahun 2010. Penurunan tersebut merupakan salah satu keberhasilan dari MDGs. Sayangnya, jika dilihat lebih dalam, penurunan jumlah kemiskinan tersebut tidak merata baik di

antara negara, wilayah, maupun antar kelompok sosial. Pada tanggal 21 Oktober 2015, negara-negara di dunia menyepakati tujuan pembangunan bersama yang akan dicapai hingga tahun 2030. Tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut dikenal sebagai *Sustainable Development Goals (SDGs)*. SDGs dirumuskan dengan tujuan untuk terus melanjutkan tujuan pembangunan yang masih belum tercapai dan

terus perlu dipertahankan dari tujuan pembangunan Milenium atau dikenal *Millenium Development Goals (MDGs)* yang berakhir di akhir Tahun 2015. Dalam proses perumusan *SDGs*, 193 negara menyepakati 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda pembangunan dunia untuk kemaslahatan manusia di dunia dan planet bumi. Dalam 17 tujuan *SDGs* tersebut, tujuan pertama adalah mengentaskan segala bentuk kemiskinan di negara manapun. Pengentasan kemiskinan merupakan permasalahan global yang tidak dapat dipisahkan dalam agenda pembangunan global. Negara-negara di dunia termasuk Indonesia turut serta melakukan upaya dalam mengentaskan kemiskinan di negara masing-masing.

Liu Qian-Qian, Yu Man dan Wang Xiao-Lin (2015) dalam jurnal "*Advances in Climate Change Research*" menjelaskan bahwa penanggulangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan tidak dapat dipisahkan dan penanggulangan kemiskinan merupakan dasar pemikiran dalam pembangunan berkelanjutan. Jurnal tersebut menjelaskan bahwa target penanggulangan kemiskinan yang ditentukan secara global melalui SDGs adalah kemiskinan multidimensi yang tidak hanya dilihat dari sisi ekonomi melainkan kemiskinan dalam segala bentuk dan dimana pun. Lebih lanjut diharapkan cara-cara baru dalam mengentaskan kemiskinan harus di gali dan pemerintah harus berupaya sekuat tenaga membangun kerjasama dalam penanggulangan kemiskinan dan pembangunan. Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu situasi dimana suatu standar kehidupan yang "layak" tidak tercapai. Dalam menentukan standar kehidupan yang "layak", BPS melakukan pengukuran kemiskinan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar, dengan pendekatan ini kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran yang disetarakan dengan kebutuhan konsumsi kalori perkapita perhari). Dengan pendekatan ini kemudian ditentukan Garis Kemiskinan (yang merupakan gabungan dari Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan non-Makanan), penduduk yang memiliki rata-rata pendapatan per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan

dikategorikan penduduk miskin. Cara penentuan penduduk miskin semacam ini disebut penentuan kemiskinan absolut.

### Gambaran Umum Penduduk Miskin

Dalam RPJMN Tahun 2015-2019, kemiskinan di Indonesia di targetkan akan berkurang nejadi 7-8% di tahun 2019, dengan tingkat capaian sebesar 11,13 % di tahun 2015. Target penurunan tingkat kemiskinan ini akan tercapai bila ditopang oleh kebijakan yang sistemik dan menyeluruh di seluruh bagian wilayah Indonesia. Dari Data BPS RI, tingkat Kemiskinan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015 adalah sebesar 4,83% atau 66.620 jiwa penduduk miskin. Capaian ini merupakan capaian terendah ke 3 di Indonesia setelah DKI Jakarta sebesar 3,61 % dan Kalimantan Selatan sebesar 4,72%. Di tingkat Kabupaten, khususnya di Kabupaten Bangka Barat, perkembangan tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin nya adalah sebagai berikut pada tabel 1.

Tabel 1. Jumlah dan Tingkat kemiskinan di Kabupaten Bangka Barat

Tahun	Tingkat Kemiskinan	Jumlah penduduk Miskin
2011	3.59	6.534
2012	3.72	6.893
2013	3.26	6.175
2014	3.15	6.097
2015	3,08	6.010

Sumber : BPS Kabupaten Bangka Barat

Capaian Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2015 merupakan capaian terendah dalam kurun lima tahun terakhir dan terbaik bila dibandingkan dengan 6 Kabupaten/Kota lain dalam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jika dicermati lebih dalam, perkembangan tingkat dan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bangka Barat berfluktuatif, namun cenderung menurun selama kurun waktu 6 tahun dari tahun 2010 s.d. tahun 2015. jika didasarkan pada target RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010-2015 dengan target Jumlah kemiskinan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 sebesar 3.492-3.860 jiwa. Maka capaian jumlah

kemiskinan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 sebesar 6.010 jiwa tidak mencapai target yang diinginkan.

Penurunan jumlah dan tingkat kemiskinan di Kabupaten Bangka Barat mengalami perlambatan. Kondisi perlambatan penurunan kemiskinan juga terjadi di tingkat Nasional. Penyebab terjadinya perlambatan tersebut salah satunya adalah belum efektifnya program-program perlindungan sosial yang membantu masyarakat miskin. Kegiatan penanggulangan kemiskinan bergantung pada desain kebijakan program penanggulangan kemiskinan yang dirumuskan. Untuk daerah dengan tingkat kemiskinan yang rendah, program penanggulangan kemiskinan yang bersifat massal sudah tidak lagi dapat diandalkan. Tingkat kemiskinan yang rendah menunjukkan bahwa kemiskinan yang ada sebagian besar merupakan kemiskinan yang sudah kronis dengan lokasi yang menyebar. Rumah-tangga dengan ciri kemiskinan yang kronis, atau yang miskin karena akumulasi berbagai faktor, semestinya mendapatkan intervensi program yang lebih komprehensif dibandingkan rumah tangga dengan karakteristik kemiskinan yang lebih sederhana.

**Perumahan** merupakan Indikator yang menjadi ukuran dalam melihat kondisi perumahan penduduk Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat dari indikator pemenuhan Air Bersih, Listrik, dan Sanitasi. Untuk indikator pemenuhan air bersih, persentase keluarga yang menggunakan air bersih di Kabupaten Bangka Barat meningkat dari 70,86% di Tahun 2010 menjadi 77,58% di Tahun 2014. Meskipun tidak seluruh rumah tangga menggunakan listrik, namun jaringan listrik di Kabupaten Bangka Barat sudah menjangkau ke seluruh pedesaan yang ada. Rumah tangga pengguna listrik pada tahun 2011 sebesar 68% dan meningkat signifikan hingga mencapai 96% di tahun 2015. Lalu untuk indikator sanitasi dasar, data Dinas Kesehatan (2016) dalam RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021, persentase keluarga bersanitasi dasar di Kabupaten Bangka Barat sejak tahun 2011 terus meningkat. Pada Tahun 2011, keluarga bersanitasi dasar hanya mencapai 53,38%, lalu 70,19% di Tahun 2012, 73,02 % di tahun 2013 dan 76,01% di tahun 2014.

**Program SATAM EMAS.** Pada tahun

2013, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengeluarkan kebijakan program penanggulangan kemiskinan untuk seluruh wilayah Kabupaten/Kota dibawahnya, dikenal dengan Program Satu Milyar Untuk Tiap Kecamatan Menuju Pembangunan Efektif, Merata, Adil dan Selaras (SATAM EMAS).

Program penanggulangan kemiskinan SATAM EMAS tersebut dilaksanakan di Kabupaten Bangka Barat sejak tahun 2014. Namun, capaian penyerapan anggaran di Kabupaten Bangka Barat, selama 3 tahun melaksanakan program tersebut, capaian penyerapannya cenderung menurun. Penyerapan anggaran pada tahun 2016 lebih rendah bila dibandingkan dengan penyerapan anggaran tahun 2014, dan penyerapan anggaran tahun 2015 juga lebih rendah bila dibandingkan dengan penyerapan anggaran tahun 2014 dan 2016. Capaian lebih baik dicapai oleh Kabupaten Belitung Timur, dimana sejak 3 tahun pelaksanaannya, capaian penyerapan anggaran Kabupaten Belitung Timur terus meningkat, ini menunjukkan kemampuan daerah dalam mengimplementasikan kebijakan meningkat dan menjadi lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Program SATAM EMAS diimplementasikan di seluruh Kabupaten/Kota yang ada dengan landasan aturan yang sama dan dengan perlakuan yang sama, namun kenyataannya ada daerah yang berhasil mengimplementasikannya dan ada daerah yang kurang berhasil. Untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan studi kasus di daerah yang kurang berhasil yaitu di Kabupaten Bangka Barat. Penelitian dilakukan untuk melihat lebih dalam proses implementasi program SATAM EMAS dan mengidentifikasi factor yang menghambat implementasi program SATAM EMAS di Kabupaten Bangka Barat khususnya di tahun terakhir pelaksanaannya yaitu di tahun 2016.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dimana data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian dilakukan di Kabupaten Bangka Barat. Total informan dalam penelitian ini yaitu 22 orang yaitu 1 informan dari Bappeda Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016, 1 informan dari DPPKAD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016, 4

informan dari SKPD Kecamatan yang berbeda dan 16 informan dari Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola (KMPS). Sebagai acuan, penelitian menggunakan Model Proses Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh Thomas B. Smith (1973). Menurut Smith (1973:202-205), dalam proses implementasi ada empat variabel yang penting yang saling terkait dan saling mempengaruhi, yaitu kebijakan yang diidealkan (*idealized policy*), yakni pola-pola interaksi ideal yang diharapkan para pembuat kebijakan; kelompok sasaran (*target groups*), yaitu mereka (orang-orang) yang paling langsung dipengaruhi oleh kebijakan dan yang harus mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh kebijakan. Kelompok sasaran adalah orang-orang dalam organisasi atau kelompok yang terkena dampak kebijakan; Organisasi Implementasi (*implementing organization*), yaitu badan-badan pelaksana atau unit-unit birokrasi pemerintah yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan; (4) Faktor Lingkungan (*environmental factor*), yakni unsur-unsur dalam lingkungan yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh implementasi kebijakan, seperti aspek budaya, sosial, ekonomi, dan politik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Implementasi Program SATAM EMAS di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 yaitu:

- a. Sebagai dasar pelaksanaan Program SATAM EMAS, terlebih dahulu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyusun dan menetapkan Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Program SATAM EMAS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016. Pedoman Umum ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 32 Tahun 2016 pada tanggal 06 Juni 2016, sedangkan Petunjuk Teknis Program SATAM EMAS ditetapkan melalui surat keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/542/BAPPEDA/2016 pada tanggal 13 Juni 2016 yang kemudian diubah melalui Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/719/BAPPEDA/2016 pada tanggal 18 Agustus 2016.
- b. Setelah Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Program SATAM EMAS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan, Pedum dan Juknis tersebut di sosialisasikan dan didistribusikan ke seluruh Kabupaten/Kota dalam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung termasuk Kabupaten Bangka Barat. Di Kabupaten Bangka Barat, Pedum dan Juknis di sosialisasikan dan didistribusikan secara berjenjang yaitu pihak kabupaten mensosialisasikan dan mendistribusikan Pedum dan Juknis kepada SKPD Kecamatan selaku *The Implementing Organization* dalam implementasi Program SATAM EMAS, lalu kemudian SKPD Kecamatan mensosialisasikan dan mendistribusikan Pedum dan Juknis Program SATAM EMAS kepada KMPS di wilayahnya masing-masing selaku *Target Group* dalam implementasi Program SATAM EMAS. KMPS terlebih dahulu harus dibentuk oleh Desa/Kelurahan sesuai kebutuhan di Desa/Kelurahan.
- c. Setelah terjadi kesamaan persepsi terkait implementasi Program SATAM EMAS, pihak Desa/Kelurahan bersama-sama KMPS mulai menyusun nama-nama calon penerima manfaat Program SATAM EMAS yang dirasa layak untuk dibantu di Desa/Kelurahannya masing-masing. Nama-nama calon penerima manfaat dari desa/Kelurahan diusulkan oleh Desa/Kelurahan ke Kecamatan untuk diverifikasi.
- d. Nama-nama calon penerima manfaat Program SATAM EMAS yang telah diusulkan oleh Desa/Kelurahan kemudian diverifikasi oleh SKPD Kecamatan, baik verifikasi kelengkapan dokumen dan persyaratan serta verifikasi langsung ke lokasi calon penerima untuk memastikan kelayakan calon penerima manfaat untuk menerima bantuan rumah layak huni Program SATAM EMAS. Setelah nama-nama calon penerima manfaat diverifikasi dan dirasa layak oleh SKPD Kecamatan, usulan nama-nama calon penerima manfaat kemudian diusulkan oleh Camat kepada Bupati Bangka Barat melalui sekretariat Tim Koordinasi Program SATAM EMAS Kabupaten Bangka Barat di Bappeda Kabupaten Bangka Barat.
- e. Di tingkat Kabupaten, nama-nama calon penerima manfaat yang diusulkan oleh Kecamatan, diverifikasi kembali, selain mengecek kembali kelengkapan

- persyaratan dokumen, di tingkat Kabupaten dilakukan verifikasi kawasan calon lokasi penerima manfaat apakah masuk kedalam kawasan hutan, jika ditemukan calon lokasi yang tidak memenuhi persyaratan, Kabupaten akan meminta Kecamatan untuk segera mengusulkan calon penerima pengganti.
- f. Setelah nama-nama calon penerima manfaat dipastikan sesuai dan layak oleh Tim Koordinasi program SATAM EMAS Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya nama-nama tersebut akan ditetapkan menjadi nama-nama penerima manfaat Program SATAM EMAS Kabupaten Bangka Barat melalui Keputusan Bupati Bangka Barat. Surat Keputusan Bupati Bangka Barat tentang penetapan penerima manfaat Program SATAM EMAS Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 menjadi syarat pencairan dana transfer dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke kas daerah pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
- g. Setelah dana Program SATAM EMAS tersedia di kas daerah Kabupaten Bangka Barat, SKPD Kecamatan dapat mengajukan pencairan dana Program SATAM EMAS untuk di transfer ke rekening KMPS secara bertahap.
- h. Saat dana diterima KMPS, KMPS dapat memulai pekerjaan pembangunan rumah layak huni di lokasi masing-masing. KMPS akan menerima dana secara bertahap sesuai progress pekerjaan pembangunan fisik rumah.
- i. Saat pekerjaan pembangunan rumah layak huni berlangsung, SKPD Kecamatan melakukan pemantauan untuk memastikan pekerjaan dilakukan sesuai Juknis yang telah ditetapkan membantu memecahkan permasalahan yang ada dilapangan dan memastikan pekerjaan dapat selesai tepat pada waktunya. Setelah rumah layak huni selesai dibangun, KMPS menyerahkan hasil pekerjaan ke SKPD Kecamatan, untuk kemudian dihibahkan kepada masyarakat Kabupaten Bangka Barat, namun kenyataannya Kabupaten Bangka Barat hanya mampu menyerap anggaran sebesar Rp. 4.080.000.000,- (empat milyar delapan puluh juta rupiah). Ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam rangkaian proses implementasi program yang mendorong jadwal rangkaian proses implementasi itu sendiri yang akhirnya menyebabkan tidak dapat terlaksananya pekerjaan pembangunan tahap kedua di Kabupaten Bangka Barat. Pada Aspek Idealized Policy, Pedoman Umum (Pedum) dan Petunjuk teknis (Juknis) program disusun oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di Kabupaten Bangka Barat Pedum dan Juknis kemudian didistribusikan dan disosialisasikan ke seluruh Kecamatan (The implementing Organization) dan ke sebagian besar Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola (KMPS) / Target Group, namun ditemukan adanya hambatan implementasi program karena adanya perubahan Juknis program. Perubahan Juknis kemudian mendorong jadwal penyampaian proposal dari Kecamatan ke Kabupaten yang akhirnya mendorong jadwal penetapan penerima manfaat program oleh Bupati Bangka Barat. Pada Aspek Target Group, tahapan proses penentuan nama-nama penerima manfaat terlaksana dengan baik dan pembangunan rumah dapat diselesaikan tepat waktu, namun penyaluran dana ke KMPS lama. Hal ini menyebabkan KMPS mengalami hambatan untuk memulai pekerjaan pembangunan rumah layak huni Program SATAM EMAS. Pada Aspek The Implementing Organization, proses verifikasi calon penerima manfaat dan pemantauan rutin terhadap pekerjaan KMPS terlaksana dengan baik, namun terdapat hambatan akibat tidak adanya persyaratan yang jelas yang diminta pada proses pencairan dana ke rekening KMPS. Hal ini menghambat Kecamatan untuk mencairkan dana program SATAM EMAS ke rekening KMPS melalui DPPKAD Kabupaten Bangka Barat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses implementasi Program SATAM EMAS di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016, belum sepenuhnya berjalan optimal. Total anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan Program SATAM EMAS di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 yaitu Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) untuk 6 Kecamatan yang ada di

Dari Aspek Environmental Factor, menjadi faktor pendukung proses implementasi program SATAM EMAS di Kabupaten Bangka Barat. Dari faktor sosial, adanya orang-orang yang membantu meminjamkan dana dan/atau bahan bangunan sangat membantu KMPS untuk memulai pekerjaan pembangunan rumah layak huni

sebelum adanya pencairan dana program. Dari faktor ekonomi, masih banyak masyarakat yang pekerjaan sehari-harinya sebagai tukang bangunan yang dapat dipekerjakan sehingga memudahkan KMPS. Dari faktor politik, adanya kebijakan pemerintah Kabupaten Bangka Barat untuk menyediakan dana pendamping program SATAM EMAS melalui APBD Kabupaten, memperlancar pelaksanaan tugas serta peran Kecamatan dan Tim Koordinasi Kabupaten dalam rangkaian proses implementasi program SATAM EMAS. Namun, dari faktor budaya, ditemukan adanya faktor yang tidak menghambat, dan juga tidak mendukung yaitu adanya pola pikir yang menganggap bahwa untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan rumah layak huni Program SATAM EMAS, segala sesuatunya pasti telah disiapkan oleh pemerintah baik pembiayaan untuk pekerja maupun untuk pembelian bahan bangunannya, sehingga tidak timbulnya rasa kegotongroyongan masyarakat untuk membantu pekerjaan pembangunan tersebut.

#### KESIMPULAN DAN SARAN

Proses Implementasi Program SATAM EMAS di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 belum berjalan dengan baik. Penyebab ketidakefektifan penyerapan anggaran Program SATAM EMAS di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 adalah karena munculnya serangkaian hambatan-hambatan berupa ketidaksesuaian dalam rangkaian proses implementasi Program SATAM EMAS di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016. Adapun hambatan tersebut akhirnya mendorong jadwal pencairan dana program SATAM EMAS hingga ke awal Desember 2016 sehingga pencairan dana tahap kedua sudah tidak mungkin lagi untuk dilakukan. Untuk mendukung terjadi persamaan persepsi, kesamaan informasi mengenai program, kesamaan pengetahuan mengenai peran dan tugas masing-masing pihak, pengetahuan akan tahapan pelaksanaan program, sebaiknya disusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) ditingkat Kabupaten Bangka Barat. Juklak tersebut dibentuk sebagai turunan dari Pedum dan Juknis Program SATAM EMAS yang telah disusun oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Juklak tersebut disusun bersama oleh segala pihak yang terkait dalam pelaksanaan Program SATAM EMAS dan yang paling utama, Juklak harus memuat standar waktu proses setiap tahapan agar tidak terulang kembali keterlambatan-

keterlambatan disetiap tahapannya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Presiden Republik Indonesia. 2015. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019*. Jakarta : Sekretariat Presiden Republik Indonesia.
- Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. 2014. *Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010-2015*. Bangka Barat : Sekretariat DPRD Kabupaten Bangka Barat
- Smith, Thomas B. 1973. *The Policy Implementation Process*. Policy Sciences Volume 4 :197-209.
- Qian-Qian, Liu, Yu Man, dan Wang Xiao Lin. 2015. *Poverty Reduction Within The Framework of SDGs and Post 2015 Development Agenda*. Advances in Climate Change Research Volume 6 : 67-73.

ORIGINALITY REPORT

---

9%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

---

PRIMARY SOURCES

---

1

123dok.com

Internet Source

4%

2

docplayer.info

Internet Source

3%

3

jdi.h.babelprov.go.id

Internet Source

2%

---

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On